

## **Fakta empiris kurva U-terbalik Kuznets mengenai pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi**

**Nessy Fameylan Alin\*; Heriberta; Etik Umiyati**

Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi

*\*E-mail korespondensi:nessyalin@yahoo.co.id:*

### **Abstract**

*The study aimed to analyze the development of the gini ratio and income per capita and to prove whether the hypothesis of Kuznets (U-inverted curve) applies in Jambi Province. To prove whether the Kuznets hypothesis applies in Jambi Province through an analysis of the relationship between per capita income and the gini ratio. The results of the study found that the growth of per capita income in Jambi Province was followed by the development of relatively fluctuating income inequality. Therefore, the Kuznets' hypothesis is not valid in Jambi Province.*

---

**Keywords:** *Gini Ratio, GDP per capita, U-inverted curve*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan gini rasio dan pendapatan perkapita serta membuktikan apakah hipotesis Kuznets (Kurva U-terbalik) berlaku di Provinsi Jambi. Data dianalisis secara deskriptif kuantitatif. Untuk membuktikan apakah hipotesis Kuznets berlaku di Provinsi Jambi melalui analisis keterkaitan antara pendapatan perkapita dengan nilai gini rasio. Hasil penelitian menemukan bahwa pertumbuhan pendapatan perkapita di Provinsi Jambi diikuti dengan ketimpangan pendapatan yang relatif berfluktuasi setiap tahunnya. Oleh karenanya, hipotesis Kuznets tidak berlaku di Provinsi Jambi.

---

**Kata Kunci:** Rasio Gini, PDRB perkapita, Kurva U-terbalik

### **PENDAHULUAN**

Pembangunan ekonomi pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang lebih merata. Sering terjadi dilema antara menekankan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak menjadi jaminan bahwa ketidakseimbangan pendapatan akan rendah. Tambunan (2014) menyatakan terkonsentrasinya kegiatan ekonomi pada suatu daerah tertentu secara langsung berdampak pada ketimpangan pendapatan antar daerah, sehingga tercipta kondisi dimana daerah yang menjadi pusat konsentrasi kegiatan ekonomi akan lebih mampu memberikan pendapatan yang lebih tinggi kepada masyarakatnya. Dengan demikian, maka lahirlah masyarakat yang relatif lebih makmur. Akan tetapi disisi lain, daerah yang bukan pusat kegiatan ekonomi hanya mampu memberikan pendapatan yang rendah yang mengakibatkan relatif rendah pula kemakmuran masyarakatnya.

Adam Smith mengemukakan inti dari proses pertumbuhan ekonomi dibedakan menjadi dua aspek utama yaitu pertumbuhan output (GDP) total dan pertumbuhan penduduk (Arsyad, 2004). Sedangkan menurut Kuznets (Todaro, 2008), pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kuznets mengatakan bahwa mula-mula ketika pembangunan di mulai distribusi pendapatan tidak merata, namun setelah mencapai suatu tingkat pembangunan tertentu distribusi pendapatan makin merata (Kuncoro, 2006). Seolah-olah dalam jangka pendek ada korelasi positif antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan distribusi pendapatan, artinya pertumbuhan ekonomi akan diikuti dengan meningkatnya ketimpangan distribusi pendapatan. Namun dalam jangka panjang hubungan keduanya menjadi korelasi negatif, artinya peningkatan pendapatan akan diikuti dengan penurunan ketimpangan distribusi pendapatan (Todaro, 2008). Bahasan mengenai hubungan antara ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi mulai mengemuka ketika ekonom Simon Kuznets mengemukakan hipotesis U terbalik (Galbraith dan Kum, 2012).

Provinsi Jambi merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dan secara umum cenderung berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Namun demikian kondisi tersebut tidak serta merta mencerminkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Jambi secara menyeluruh. Hal ini terlihat dari perbedaan nilai PDRB dan laju PDRB antar daerah, yang berdampak terhadap perbedaan tingkat kesejahteraan antar daerah, dan pada akhirnya menyebabkan ketimpangan antar daerah yang semakin lebar serta dapat menghambat pembangunan ekonomi daerah. Namun jika mengacu pada hipotesis Kuznets, pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh ketimpangan hanya terjadi di awal pembangunan dan kemudian apabila telah sampai di titik puncaknya maka ketimpangan tersebut akan menurun, sehingga apabila digambarkan dalam bentuk kurva akan membentuk huruf U terbalik. Berdasarkan latar belakang tersebut maka perlu dibuktikan apakah hipotesis kurva U-terbalik Kuznets juga berlaku di Provinsi Jambi.

## **METODE**

Data yang digunakan adalah data sekunder periode waktu 2001 hingga 2016, mencakup data gini rasio dan PDRB perkapita Provinsi Jambi. Gini rasio merupakan salah satu ukuran ketimpangan yang memenuhi empat kriteria yaitu prinsip anonimitas, prinsip indenpensi skala, prinsip indenpensi populasi, dan prinsip transfer (Todaro dan Smith, 2008). PDRB adalah nilai bersih barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam satu periode (Hadi Sasana, 2006).

Data dianalisis secara deskriptif kuantitatif. Untuk membuktikan hipotesis U-terbalik Kuznets secara teori berlaku di Provinsi Jambi dilakukan dengan cara menghubungkan koefisien gini dengan pendapatan perkapita Provinsi Jambi. Dengan indikator apabila kedua angka indeks tersebut menggambarkan kurva U-Terbalik, maka teori Kuznets berlaku di Provinsi Jambi, demikian sebaliknya (Mudrajat Kuncoro, 2006).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Fenomena ketimpangan pendapatan wilayah memang sudah menjadi hal yang biasa dalam perkembangan suatu wilayah. Ketimpangan tersebut tidak hanya terjadi pada lingkup negara, bahkan sampai pada wilayah provinsi atau unit yang lebih rendah sekalipun. Ketimpangan sering menjadi permasalahan yang serius bagi setiap wilayah

karena berpotensi menimbulkan konflik sosial, finansial, atau hubungan yang saling memperlemah antar wilayah. Salah satu indikator yang digunakan melihat ketimpangan pendapatan adalah gini rasio. Gini rasio juga digunakan untuk mengukur tingkat pemerataan pendapatan dan pengeluaran rumah tangga pada masing-masing wilayah.

Gini rasio adalah ukuran ketimpangan agregat yang nilainya berkisar antara nol dan satu. Nilai koefisien Gini nol artinya tidak ada ketimpangan (pemerataan sempurna) sedangkan nilai satu artinya ketimpangan sempurna. Tabel 1 memberikan perkembangan Gini Rasio dan PDRB perkapita Provinsi Jambi dari Tahun 2001 – 2016.

**Tabel 1.** Gini rasio dan PDRB perkapita Provinsi Jambi periode 2001-2016

Tahun	Gini Rasio	Pertumbuhan (%)	PDRB perkapita (Rp)	Pertumbuhan (%)
2001	0,240	-	22.000.370	-
2002	0,273	13,8	22.558.613	2,54
2003	0,320	17,2	22.906.029	1,54
2004	0,320	0,0	23.669.507	3,33
2005	0,304	-5,0	24.832.793	4,91
2006	0,330	8,6	25.834.185	4,03
2007	0,321	-2,7	27.001.620	4,52
2008	0,295	-8,1	28.457.765	5,39
2009	0,269	-8,8	29.785.224	4,66
2010	0,304	13,0	29.304.866	-1,61
2011	0,340	11,8	30.834.893	5,22
2012	0,340	0,0	32.419.987	5,14
2013	0,349	2,6	33.694.599	3,93
2014	0,329	-5,7	35.878.092	6,48
2015	0,360	9,4	36.753.230	2,44
2016	0,345	-4,2	37.728.368	2,65
<b>Rata-rata</b>	<b>0,315</b>	<b>2,61</b>	<b>28.978.759</b>	<b>3,68</b>

Sumber : BPS Provinsi Jambi, data diolah, 2018

Rata-rata gini rasio di Provinsi Jambi selama tahun 2001 hingga 2016 adalah sebesar 0,315. Nilai tersebut masih tergolong dalam tingkat ketimpangan yang rendah (nilai koefisien rata-rata ketimpangan kurang dari 0,4). Peningkatan nilai ketimpangan yang tertinggi berada pada tahun 2003 yaitu sebesar 17,2 persen. Dimana pada tahun 2002 ketimpangan hanya berada pada angka 0,273 kemudian ditahun 2003 meningkat hingga 0,320. Nilai ketimpangan tertinggi pada tahun 2013 sebesar 0,349. Untuk nilai ketimpangan terendah pada tahun 2001 yaitu sebesar 0,240.

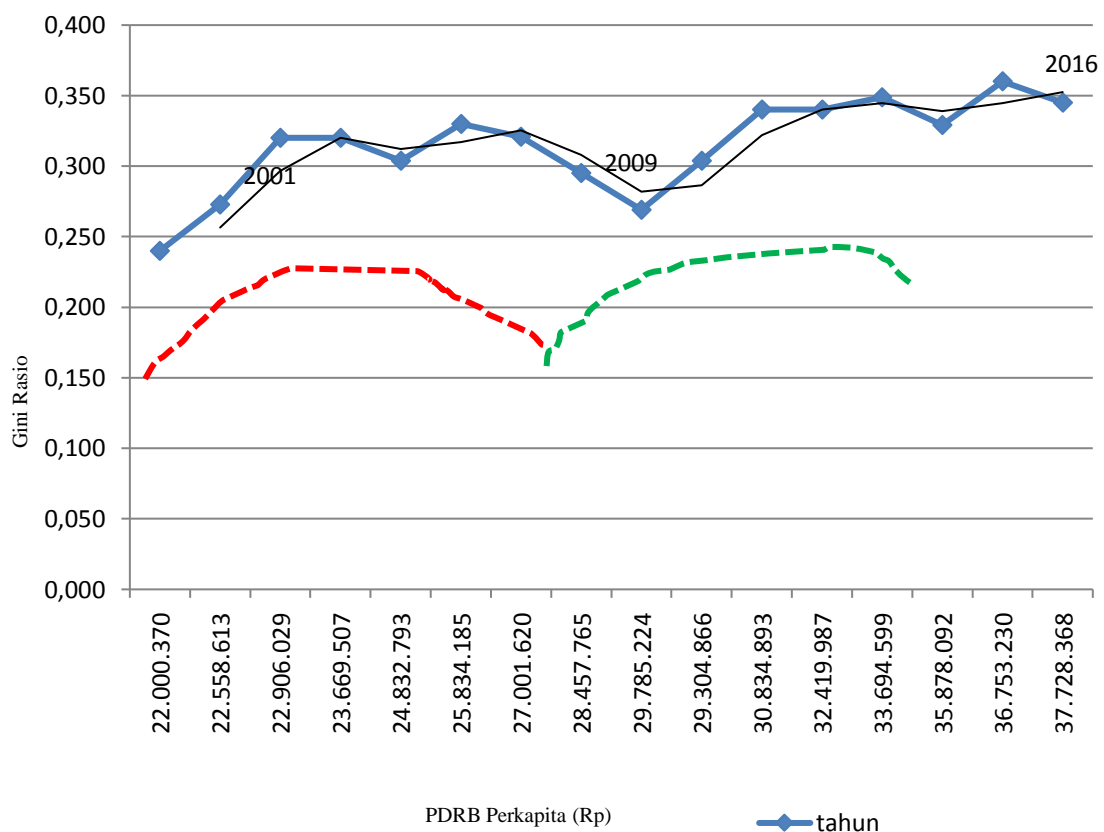
Selama 5 tahun terakhir yaitu tahun 2011 hingga 2016, Provinsi Jambi berhasil menjaga gini rasio pada angka yang relatif rendah rata-rata 0,33 per tahun. Kondisi ini selalu dibawah nasional. Artinya ketimpangan pendapatan masyarakat Provinsi Jambi lebih kecil dibandingkan ketimpangan pendapatan masyarakat Indonesia.

Selanjutnya, selama tahun 2001 hingga 2016, beberapa tahun PDRB perkapita di Provinsi Jambi lebih besar daripada PDB perkapita nasional, yaitu pada tahun 2010, 2012 hingga tahun 2016. Pada tahun 2010 PDRB perkapita di Provinsi Jambi sebesar Rp 29.304.866,- sedangkan PDB perkapita nasional hanya berada pada angka Rp 28.788.200,-. Untuk tahun 2012 PDRB perkapita Provinsi Jambi sebesar Rp 32.419.987,- dan PDB nasional sebesar Rp 31.484.500,-. Begitu pula di tahun 2013, 2014, 2015, dan 2016. PDRB perkapita Provinsi Jambi terlihat lebih besar jika dibandingkan dengan PDB

perkapita nasional. Rata-rata PDRB Provinsi Jambi dari tahun 2001 hingga 2016 adalah sebesar Rp 28.978.759,-.

Berdasarkan Tabel 1 dapat digambarkan kurva U-terbalik Kuznets di Provinsi Jambi dengan menghubungkan antara nilai PDRB perkapita dan nilai gini rasio (Gambar 1). Terlihat bahwa selama periode 2001 hingga 2009 pada awalnya pertumbuhan pendapatan perkapita diikuti oleh ketimpangan pendapatan yang juga meningkat. Hingga di tahun 2007 ketimpangan berada pada puncak tertingginya yaitu 0,321 poin. Pada tahun berikutnya ketimpangan pendapatan mulai menurun.

Selama tahun 2001 hingga 2016 ternyata tidak terbukti bahwa Kurva U-terbalik Kuznets berlaku di Provinsi Jambi karena bentuk kurva yang dihasilkan tidak membentuk huruf U-terbalik seperti hipotesis Kuznets. Namun kurva U-terbalik Kuznets dapat terlihat apabila dibagi menjadi dua periode, yaitu periode 2001 hingga 2009, dan periode 2009 hingga 2016.



**Gambar 1.** Kurva Kuznets Provinsi Jambi Tahun 2001-2016

Sumber : BPS Provinsi Jambi, data diolah

Pembuktian Kurva U-terbalik Kuznets juga dilakukan untuk kabupaten/kota di Provinsi Jambi, namun dengan periode waktu yang lebih singkat yaitu antara Tahun 2011 hingga 2016. PDRB perkapita dan gini rasio kabupaten/kota di Provinsi Jambi selama Tahun 2011 – 2016 diberikan pada Tabel 2. Selanjutnya hasil analisis hubungan antara PDRB perkapita dan gini rasio kabupaten/kota di Provinsi Jambi, diberikan pada Tabel 3.

**Tabel 4.** PDRB perkapita dan gini rasio kabupaten/kota di Provinsi Jambi

Kabupaten/ Kota	Ket	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kerinci	Yt	16.431.370	17.623.235	18.632.238	20.561.208	21.798.181	23.167.944
	GR	0,31	0,32	0,30	0,27	0,32	0,28
Merangin	Yt	18.303.521	18.996.038	19.744.321	21.054.854	21.820.021	22.809.204
	GR	0,32	0,31	0,33	0,33	0,36	0,33
Sarolangun	Yt	27.983.842	29.478.164	30.821.081	31.870.285	32.300.383	32.967.298
	GR	0,41	0,36	0,38	0,31	0,39	0,34
Batanghari	Yt	30.288.450	32.123.665	33.504.909	36.152.921	37.199.286	38.409.618
	GR	0,32	0,30	0,29	0,29	0,26	0,30
Muaro Jambi	Yt	28.826.442	29.853.558	30.916.123	32.391.213	33.164.924	34.011.536
	GR	0,26	0,30	0,28	0,24	0,34	0,34
Tanjabtjm	Yt	64.981.733	66.586.857	69.248.267	73.317.633	74.088.649	75.506.708
	GR	0,30	0,28	0,28	0,36	0,29	0,26
Tanjungbar	Yt	72.776.348	74.330.005	76.537.083	80.524.005	81.842.958	82.841.816
	GR	0,34	0,32	0,31	0,33	0,36	0,33
Tebo	Yt	20.472.697	21.470.926	22.518.126	24.256.444	25.073.176	25.945.904
	GR	0,29	0,30	0,30	0,29	0,37	0,32
Bungo	Yt	24.791.465	26.371.452	27.910.027	29.226.810	30.031.410	30.894.340
	GR	0,34	0,36	0,33	0,35	0,35	0,34
Kota Jambi	Yt	21.887.213	23.053.395	24.484.413	26.546.802	27.637.768	29.145.085
	GR	0,36	0,36	0,34	0,33	0,39	0,38
Kota S.Penuh	Yt	32.847.429	35.085.683	37.877.285	40.140.840	42.525.849	44.861.001
	GR	0,30	0,32	0,32	0,34	0,33	0,33
Prov. Jambi	Yt	30.834.893	33.003.540	33.694.599	35.878.092	36.753.230	37.728.368
	GR	0,34	0,34	0,35	0,33	0,36	0,35

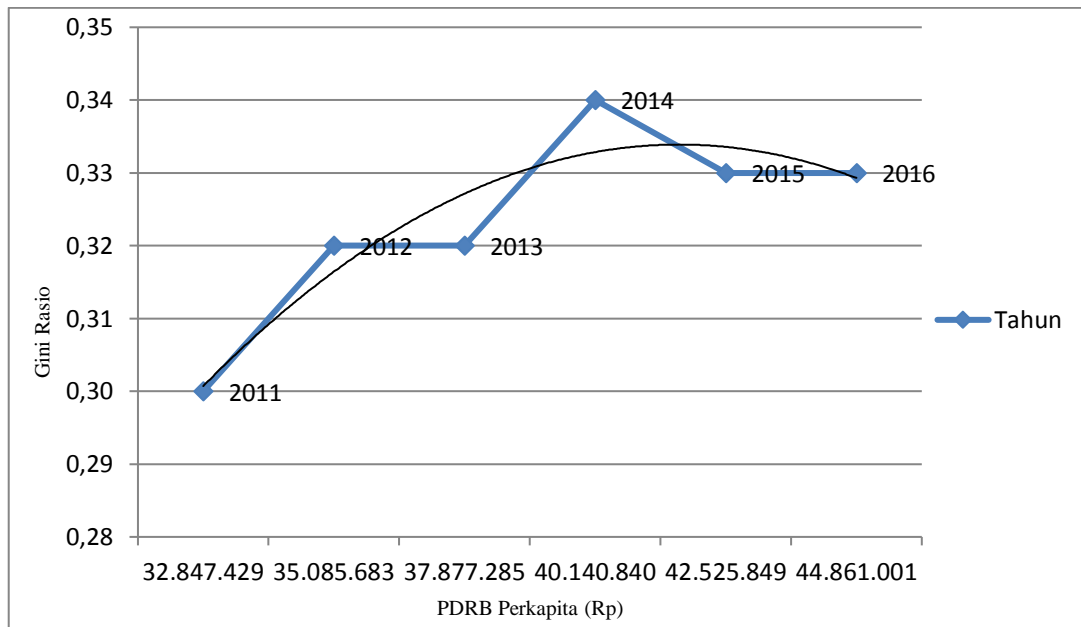
Sumber : BPS Provinsi Jambi, data diolah

**Tabel 5.** Analisis kurva U-terbalik Kuznets kabupaten/kota di Provinsi Jambi periode 2011-2016

Kabupaten/Kota	Kesimpulan
Kabupaten Kerinci	Hipotesis U-terbalik Kuznets tidak berlaku
Kabupaten Merangin	Hipotesis U-terbalik Kuznets tidak berlaku
Kabupaten Sarolangun	Hipotesis U-terbalik Kuznets tidak berlaku
Kabupaten Batanghari	Hipotesis U-terbalik Kuznets tidak berlaku
Kabupaten Muaro Jambi	Hipotesis U-terbalik Kuznets tidak berlaku
Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Hipotesis U-terbalik Kuznets tidak berlaku
Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Hipotesis U-terbalik Kuznets tidak berlaku
Kabupaten Tebo	Hipotesis U-terbalik Kuznets tidak berlaku
Kabupaten Bungo	Hipotesis U-terbalik Kuznets tidak berlaku
Kota Jambi	Hipotesis U-terbalik Kuznets tidak berlaku
Kota Sungai Penuh	Hipotesis U-terbalik Kuznets berlaku

Sumber : BPS Provinsi Jambi, data diolah

Tabel 3 menunjukkan bahwa dari 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi, hanya Kota Sungai Penuh yang menunjukkan kurva U-terbalik sedangkan pada kabupaten/kota lainnya tidak menunjukkan berlakunya hipotesis U-terbalik Kuznets. Kurva U-terbalik Kota Sungai Penuh diberikan pada Gambar 2 berikut:



**Gambar 2.** Kurva Kuznets Kota Sungai Penuh tahun 2011-2016

Sumber : Data diolah, 2018

Gambar 2 memperlihatkan bahwa secara agregat pada tahap awal pertumbuhan ekonomi akan diikuti oleh ketimpangan pendapatan yang juga ikut meningkat. Terbukti dengan terus tumbuhnya pendapatan perkapita di Kota Sungai Penuh dari tahun 2011 hingga tahun 2014 namun diikuti dengan peningkatan ketimpangan pendapatan. Tahun 2014 adalah titik puncak dari ketimpangan pendapatan yang terjadi di Kota Sungai Penuh. Di tahun 2015 dan 2016 pendapatan perkapita di Kota Sungai Penuh tetap tumbuh namun kali ini diikuti oleh penurunan ketimpangan pendapatan. Jika dilihat dari bentuk kurva yang di hasilkan, maka kurva juga membentuk huruf U-terbalik. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa teori hipotesis U-terbalik Kuznets berlaku di Kota Sungai Penuh tahun 2011 hingga 2016.

Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian Sri Isnowati (2007) yang mana dalam jurnal tersebut juga tidak seluruh wilayah berlaku hipotesis U-terbalik Kuznets. Untuk hasil penelitian Sri Isnowati menyimpulkan bahwa hipotesis U-terbalik Kuznets hanya berlaku di wilayah pembangunan I Jawa Tengah. Sedangkan untuk Provinsi Jambi, kurva U-terbalik Kuznets hanya berlaku di Kota Sungai Penuh pada periode 2011 hingga 2016.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan penelitian selama periode 2001 hingga 2016 terlihat bahwa perkembangan PDRB perkapita di Provinsi Jambi cenderung meningkat setiap tahunnya kecuali di tahun 2010 terdapat penurunan PDRB perkapita sebesar 1,61 persen. Untuk perkembangan gini rasio Provinsi Jambi, gini rasio cenderung berfluktuatif di setiap tahunnya selama tahun 2001 hingga 2016. Namun Provinsi Jambi berhasil menjaga nilai gini rasio nya pada kategori ketimpangan rendah, yaitu nilai gini rasio kurang dari 0,4.

Berdasarkan hasil penelitian dengan melihat kurva U-terbalik Kuznets di Provinsi Jambi selama tahun 2001 hingga 2016 ternyata tidak terbukti bahwa Kurva U-terbalik Kuznets berlaku di Provinsi Jambi karena bentuk kurva yang dihasilkan tidak membentuk

huruf U-terbalik seperti hipotesis Kuznets. Namun kurva U-terbalik Kuznets dapat terlihat apabila dibagi menjadi dua periode, yaitu periode 2001 hingga 2009, dan periode 2009 hingga 2016.

Untuk kabupaten dan kota di Provinsi Jambi, hanya satu kabupaten yang menunjukkan kurva berbentuk U-terbalik yaitu Kota Sungai Penuh. Seperti hipotesis U-terbalik Kuznets yang mana Kuznets mengatakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi akan diikuti oleh ketimpangan pendapatan yang juga ikut meningkat dan hal ini terjadi di Kota Sungai Penuh selama tahun 2011 hingga 2016. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Hipotesis U-terbalik Kuznets tidak berlaku di Provinsi Jambi karena hanya ada satu Kota yang sesuai dengan hipotesis Kuznets.

### **Saran**

Perlunya kebijakan pemerintah untuk menekan angka ketimpangan pendapatan agar peningkatan pendapatan perkapita tidak selalu diikuti oleh ketimpangan yang juga ikut meningkat, seperti penciptaan kesempatan usaha bagi masyarakat miskin, pemberdayaan masyarakat miskin, serta peningkatan kemampuan masyarakat miskin. Sehingga pendapatan dapat terdistribusi dengan baik dan tidak hanya sekelompok masyarakat saja yang menikmati.

Tidak berlakunya hipotesis Kuznets di Provinsi Jambi dikarenakan Provinsi Jambi berhasil menjaga angka gini rasio pada kategori ketimpangan rendah, yaitu kurang dari 0,4. Oleh karena itu usaha pemerintah untuk menekan angka ketimpangan harus tetap dipertahankan dan ditambah lagi dengan kebijakan-kebijakan lainnya seperti memperbanyak pendidikan vokasi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mendapat keahlian karena melalui kemampuan masyarakat, masyarakat akan mendapatkan upah yang lebih baik dan alhasil gap pendapatan dapat diperkecil.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arsyad, L.(2004).*Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: STIE-YKPN
- Badan Pusat Statistik. (2018). Statistik Indonesia. Dalam <https://bps.go.id/>. Diakses Tanggal 2 Februari 2018
- Galbraith, J.K., & Hyunsub, K., (2012). In-equality and Economic Growth:Data Comparisons and Econometrics Tests. *UTIP Working Paper. Number 21*.
- Isnowati, S.(2007).Pengujian Hipotesis Kuznets di Wilayah Pembangunan I Jawa Tengah. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 14(1):3-13
- Kuncoro, M.(2006).*Ekonomika Pembangunan, Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Yogyakarta: LPKIS Pelangi Aksara
- Rosmeli. (2015). Dampak Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Ketimpangan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia. *Jurnal Paradigma Ekonomika*. 10(2), 362-369
- Sasana, H. (2006). Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. *Dinamika Pembangunan*, 3(2):149-151
- Syaparudin & Zulgani. (2015). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan PAD Provinsi Jambi: Pendekatan Kausalitas Granger. *Jurnal Paradigma Ekonomika*. 10(2), 312-325
- Tambunan,T. (2014). *Perekonomian Indonesia : Teori dan Temuan Empiris*. Jakarta: Ghalia Indonesia

- Todaro,MP. & Stephen C.S., (2008). *Pembangunan Ekonomi*. Edisi ke sembilan. Jakarta: Erlangga
- Yuliani, T. (2015). Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten di Kalimantan Timur.DOI. *JEJAK Journal of Economics And Policy*. 8(1), 45-53
- Zamzami & Hastuti, D., (2018). Determinan Penerimaan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengembangan Ekonomi Kreatif di Provinsi Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika*. 13(1), 37-45